

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan ajang demokrasi musiman dan hampir setiap Negara menyelenggarakan pemilu, kecuali Negara Negara dengan sistem pemerintahan kerajaan (monarki). Di Indonesia pemilu Presiden dan pemilu Legislatif dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Akantetapi Pemilu kada baik itu pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota hampir dilakukan sepanjang tahun.

Mengingat dengan sebanyak 33 Provinsi dengan jumlah kabupaten atau kota sebanyak 497 maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap satu bulan sekali beberapa daerah di Indonesia menggelar Pemilu kada. Afan Gaffar mengatakan mekanisme pemilihan kepala daerah disebut Demokratis apabila memenuhi parameter, antara lain: pertama menggunakan mekanisme yang teratur, kedua memungkinkan terjadinya rotasi pemerintahan, ketiga mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka, dan keempat akuntabilitas publik.¹

Pemilu kada digelar berdasarkan atas hukum penyelenggaraan Pemilu kada yaitu Pasal 22E jo Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 12 Tahun 2008 tentang

¹Joko . J. Priatmoko, *pemilihan kepala daerah langsung: filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 35.

Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2005.² Semua mekanisme dalam menggelar Pemilu diatur oleh UU dan PP seperti di atas, mulai dari proses penyeleksian kandidat, kampanye, sampai penghitungan suara.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan administrasi pemerintahan, aturan dan penataan tentang pemilu ini pun berkembang dalam arti terus berubah. Dalam perubahan terakhir, termaktup dalam UU No. 22 tahun 2007 yaitu tentang penyelenggaraan pemilihan umum dengan kutipan sebagai berikut:

*“ bahwa pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ”.*³

Tujuan dari Pemilu secara langsung tidak lain adalah bagaimana suatu daerah yang diberikan otonomi secara ekonomi juga diberikan otonomi secara politik, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dan karena sejarah juga sudah membuktikan otonomi secara ekonomi tidak serta merta memberikan sumbangan yang berarti bagi kedaulatan politik, peran

² Data panduan penyelenggaraan pemilu KPUD Kota Yogyakarta

³ UU Republik Indonesia No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

serta masyarakat lokal dalam memberikan kontribusi bagi perubahan daerahnya untuk membangun bagi kelangsungan perubahan sosial (*social change*) akan memberikan dampak lebih baik, karena pada masa yang lalu kepala daerah yang duduk dipemerintahan tidak pernah peduli dengan rakyat daerahnya.⁴

Berbicara pemilu maka juga akan berbicara tentang partai politik, kandidat dan konstituen. Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah pemilu maupun pemilu kada, karena setiap kandidat yang akan turut serta dalam pemilu harus melalui partai politik. Meskipun saat ini UU pemilu memberikan peluang kepada calon secara independen akan tetapi kurang dominan jika dibandingkan dengan calon yang melalui partai politik karena partai politik sudah memiliki masa atau pendukung. Sehingga kandidat lebih memilih mencalonkan diri melalui partai daripada secara independen. Akan tetapi partai politik juga memiliki kepentingan dan akan terus menyuarakan kepentingan mereka melalui kandidat yang terpilih dari partai tersebut. Sehingga setiap kandidat yang terpilih melalui partai pasti akan membawa kepentingan partai.

Kandidat juga memiliki peran penting dalam sebuah Pemilu maupun Pemilu kada, mengingat masih kentalnya figur tokoh dimasyarakat maka calon yang sudah mempunyai image dimasyarakatakan lebih mudah untuk memperoleh dukungan. Sedangkan kandidat yang tidak memiliki image

⁴Elvi Juliansyah, pilkada: *penyelenggaraan pemilihan kela daerah dan wakil kepala daerah*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 50.

dimasyarakat maka akan lebih menjual nama partai politik yang mengusungnya dalam mencari dukungan. Dalam kondisi seperti ini maka partai partai harus mengatur strategi yang jitu seperti mencari koalisi yang memiliki basis masa, melakukan analisis pasar supaya dalam kampanye politik kebijakan yang ditawarkan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga yang pada akhirnya akan berubah menjadi dukungan, dan strategi-strategi lain supaya menang dalam pemilu.

Yang paling memiliki peran penting dalam sebuah pemilu adalah partisipasi masyarakat. Yang menentukan terpilih atau tidaknya seorang kandidat adalah masyarakat (konstituen). Artinya keputusan masing-masing individu sangat berpengaruh terhadap kemenangan seorang kandidat dan masa depan partai. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka partai dapat mematahkan dukungan masanya untuk kedepan. Partisipasi politik merupakan faktor terpenting dalam suatu pengambilan keputusan, karena tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik.

Partisipasi politik dalam buku "*Partisipasi dan Partai Politik*" didefinisikan sebagai berikut: "Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)". Berdasarkan pengertian di atas, kegiatan tersebut salah satunya mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum.

Partisipasi menjadi kunci terjawabnya demokrasi dapat dibuktikan hampir semua kegiatan membutuhkan partisipasi, kalau kita setuju bahwa demokrasi tanpa partisipasi adalah manipulasi terhadap demokrasi, hal ini pernah terjadi pada masa Indonesia menerapkan pemerintah gaya orde baru, dimana partisipasi politik warga cenderung digerakan oleh rezim itu, bukan dari kesadaran masyarakat sendiri. Dengan adanya kesadaran dan keinginan masyarakat dalam berpartisipasi, maka akan terbentuk demokrasi. Dan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara demokrasi dan partisipasi merupakan dua dasar dengan nilai identitas yang sama, konsep demokrasi tumbuh melalui partisipasi, asumsi dasar kita bahwa demokrasi berasal dari partisipasi.

Perilaku memilih merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil dari masyarakat karena hal itu hanya menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana⁵. Meskipun demikian perilaku memilih menjadi sebuah obyek penelitian menarik bagi para ilmuwan sosial, termasuk perilaku memilih di Indonesia. Hal ini dikarenakan pluralitas yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, yaitu kemajemukan suku, agama, ideologi, aliran dan budaya politik dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku memilih masyarakat terhadap pemilihan partai maupun calon kepala daerah tertentu.

⁵Afan Gaffar, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under Hegemone*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, Hal 2

Dalam sebuah Pemilu, partai politik merupakan organisasi yang paling memiliki peran dominan dalam mengajukan seorang Calon atau Kandidat. Meskipun telah terbuka peluang bagi calon atau kandidat yang maju tanpa dukungan partai politik (Independen) akan tetapi cara seperti ini kurang dominan. Partai politik sampai saat ini masih dominan digunakan oleh para calon kepala daerah untuk mendapatkan masa atau dukungan. Karena di Indonesia sebagian besar masyarakatnya masih memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai politik yang mereka sukai. Dan hal itu sudah terbukti dari beberapa Pemilu yang sudah digelar di beberapa di Indonesia banyak kandidat yang berhasil menduduki kursi kepala daerah karena diusung oleh partai yang sudah memiliki basis masa yang besar.

Partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P) misalnya, merupakan partai politik yang berhasil menancapkan kukunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari beberapa Pemilu yang digelar di beberapa Kabupaten atau Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dimenangkan oleh kandidat yang di usung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Misalnya, Pemilu yang digelar secara serentak di tiga Kabupaten di DIY yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 23 Mei 2010.

Dengan strateginya yang baik dan terstruktur, dalam hal kampanye politik, perekrutan kader, dan mencari partai koalisi dalam mengusung kandidat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berhasil memenangkan dua Kandidat dari dua Kabupaten yaitu Sri Purnomo-Yuni

Satia Rahayu sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman untuk periode 2010-2015 dengan perolehan suara sebanyak 174.571 suara dengan persentase sebesar 35,185%⁶ dan Pemilukada Kabupaten Bantul juga dimenangkan oleh kandidat yang di usung oleh partai PDI-P yaitu pasangan Sri Surya Widati-Sumarno dengan jumlah perolehan suara 67,77 persen dari total pemilih 691.982.

Kemudian dalam Pemilukada Kabupaten Kulon Progo yang di gelar pada tanggal 19 juni 2011 partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan beberapa partai yang turut serta mengusung Kandidat Pasangan Hasto Wardoyo-Sutedjo (SEHAT) juga berhasil meraih suara tertinggi dengan perolehan suara sebanyak 105.965 suara dengan persentase 46,23%⁷. Dari empat Kabupaten di DIY yang sudah menyelenggarakan Pemilukada hanya satu kabupaten saja yang dimenangkan oleh kandidat yang di usung oleh partai PAN dan PKS yaitu pasangan Prof Dr Ir Sumpeno Putro MSc - Hj Badingah SSos bakal calon Bupati dari Kabupaten Gunung Kidul. Menurut saya dengan keberhasilan PDI-P dalam memenangkan Pemilukada di tiga kabupaten di DIY yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo merupakan hal yang luar biasa.

⁶<http://www.krjogja.com/news/Pemilikada.Sleman.2010.Dimenangkan.Sri.Purnomo-Yuni.html>

⁷<http://Jogja.Tribunnews.com/2011/01/14/daftar-pemilih-turun-15-ribu-orang/html>

Akan tetapi dalam Pemilukada Kota Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 25 september 2011 kemarin ada yang menarik untuk dijadikan penelitian. Sekilas memang fenomena Pemilukada Kota Yogyakarta seperti biasa saja, karena sudah menjadi hal yang biasa apabila suatu pemilu dimenangkan oleh calon *incumben* karena kandidat *incumben* biasanya sudah dikenal oleh masyarakat terlebih lagi apabila kinerja sebelumnya berhasil, menurut masyarakat yang dipimpinnya. Tapi ada hal yang menarik dari Pemilukada kota kemarin yaitu apabila kita melihat latar belakang kandidat yang bersaing dalam Pemilukada.

Dari tiga pasangan kandidat yang turut serta dalam Pemilukada ada satu pasangan kandidat yang memiliki pengaruh yang luar biasa di masyarakat khususnya masyarakat Kota Yogyakarta. Apabila dilihat dari partai pengusung dan latarbelakang keluarga pasangan ini rasanya sulit untuk dikalahkan oleh pasangan Hariyadi Suyuti-Imam Priyono (HATI). Begitu juga menurut para pengamat politik lokal di Yogyakarta. Banyak pengamat politik lokal Yogyakarta memprediksikan pasangan Achmad Hanafi Rais-Tri Harjun Ismaji yang akan berhasil memenangkan pemilu.

Prediksi ini bukanlah sebuah prediksi buta, karena para pengamat politik lokal DIY tersebut sudah mempertimbangkannya dari berbagai sudut pandang seperti latarbelakang keluarga, partai pengusung, image kandidat, dan model kampanye. Tetapi ternyata hasil perhitungan surat suara Pemilukada sangat mengejutkan, setelah perhitungan suara akhir ternyata Pemilukada dimenangkan oleh pasangan HATI.

Berikut data hasil akhir perolehan suara masing masing kandidat dalam tiap kecamatan Kota Yogyakarta.

Tabel 1.1 Tabel perolehan suara akhir Pemilukada kota yogyakarta 2011

Pasangan calon kepala daerah Danwakil kepala daerah	Mantri jeron	Kra ton	Mergang San	Pakua laman	Gon domanan	Ngam pilan	Wiro brajan	Gedong tengen	Jetis	Tegal rejo	Danu rejan	Gondo Kus Uman	Umbul har Jo	Kota Gede	Jumlah akhir
Muhammad Juhri Huda dan Drs. Aulia reza bastian, M.hum	1.468	621	1.152	391	445	880	1.098	851	882	2.044	1.183	1.654	4.505	2.383	19.557
Ahmad Hanafi rais , SIP, MMP dan Ir Tri Harjun Ismaji, Msc.	7.836	4.406	6.856	2.042	3.137	4.217	5.849	3.202	5.006	7.698	4.393	6.907	14.670	7.903	84.122
Drs H. Haryadi Suyuti Dan Imam Priyini. D. Putranto, SE, M.si	8.219	6.136	7.781	3.079	4.212	4.030	6.479	6.384	7.394	8.181	5.297	11.416	12.480	5.959	97.057
jumlah suara sah untuk semua pasangan pasangan kepala daerah															200.726

Sumber: KPUD Kota Yogyakarta 2011

Jika kita perhatikan data yang ada pada tabel diatas maka pasangan Haryadi dan Imam priyono sangat dominan mengungguli perolehan suara pasangan lainya hampir di setiap kecamatan. Bahkan pasangan yang mulanya diprediksikan unggul hanya memenangkan suara dua dikecamatan saja, yaitu kecamatan Kota Gede dan Umbul Harjo. Tapi dengan data tabel perolehan suara diatas peneliti merasa belum cukup menarik untuk mengamati fenomena Pemilu kali ini, perhatikanlah tabel dibawa ini.

Table 1.2 Tabel partai pengusung tiap pasangan calon walikota dan wakil walikota Yogyakarta.

No urut	Nama pasangan kandidat	Partai pengusung
1	Muhammad Juhri Hudaya dan Drs. Aulia reza bastian, M.hum	PKS, Hanura, PKDI, PKPB dan PRN
2	Ahmad Hanafi rais , SIP, MMP dan Ir Tri Harjun Ismaji, Msc	Demokrat, PPP, PAN, dan Gerindra serta partai-partai koalisi mataram diantaranya PBB, PKB, PDS, PDK, PPPI, PDRN, PKPI, PDP, dan PKNU
3	Drs H. Haryadi Suyuti Dan Imam Priyini. D. Putranto, SE, M.si	PDI-P dan Golkar

Sumber : KPUD Kota Yogyakarta 2011

Dari tabel diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sulit rasanya kandidat yang diusung PDI-P untuk menang. Karena partai yang mengusung pasangan HATI hanya dua partai politik, sedangkan pasangan Hanafi Rais- Tri Harjun didukung oleh banyak partai politik besar. Ditambah dengan data perolehan suara pemilu legislatif tahun 2009, maka basis suara condong pada pasangan Hanafi Rais – Tri Harjun. Perhatikan tabel perolehan suara pemilu legislatif kota Yogyakarta tahun 2009 dibawah ini.

Table 1.3 Tabel perolehan suara partai pengusung pemilu legislatif 2009.⁸

No	Partai politik	Jumlah kursi	Jumlah total suara
1	PDI-P	11	47,414
2	Demokrat	10	45,260
3	PAN	5	26,828
4	PKS	5	21,546
5	Golkar	5	15,586
6	PPP	2	13,777
7	Gerindra	2	8,788

Sumber : KPUD Kota Yogyakarta 2009

Jika diamati tabel diatas partai politik yang turut serta mendukung pasangan Hanafi Rais- Tri Harjun merupakan partai politik yang memiliki

⁸Data pemilu legislatif tahun 2009 KPUD Kota Yogyakarta

perolehan suara besar seperti Demokrat, PAN, PPP, Gerindra apa bila digabungjumlah suara di antara keempat partai politik tersebut yang total suaranya 94,655. Sedangkan partai politik yang mengusung pasangan Haryadi Suyuti – Imam Priyono, yaitu PDI-P dan Golkar hanya memperoleh total suara 63,000 suara. Dan ini sangat jauh tertinggal dari total perolehan suara partai pendukung pasangan Hanafi Rais – Tri Harjun.

Yang menarik dari penelitian ini adalah ketika ketiga data tabel diatas diamati maka sulit untuk pasangan Haryadi Suyuti – Imam Priyono untuk menang dalam pilkada Kota Yogyakarta tahun 2012, jika hanya mengandalkan dukungan suara dari PDI-Perjuangan dan Golkar saja. Disamping latar belakang keluarga Hanafi Rais yang cukup berpengaruh di masyarakat Kota Yogyakarta. Lalu bagaimana strategi yang digunakan partai PDI-Perjuangan sehingga bisa memenangkan Pilkada kota Yogyakarta tahun 2012. Karena dari hasil survei peneliti dilapangan ternyata kandidat yang diajukan dari PDI-P adalah calon wakil bupati bukan calon bupati. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mencari tahu strategi yang diterapkan oleh PDI-P seperti: Penyeleksian kandidatnya, persiapan model kampanyenya, kerja samanya dengan partai lain (koalisi), persiapan dan kerjakeras tim suksesnya, dan persiapan dananya, sebelum pemilu itu sendiri berlangsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terkait dengan strategi PDI-Perjuangan dalam memenangkan pasangan Haryadi Suyuti-Imam Priyono dalam Pemiluakada Kota Yogyakarta maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana strategi PDI-Perjuangan dalam memenangkan Pemiluakada Kota Yogyakarta tahun 2011?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Sebagai partai pemenang dalam Pemiluakada Kota Yogyakarta tahun 2011 yang berhasil menggeser perolehan suara partai pesaingnya maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui strategi PDI-Perjuangan dalam memenangkan Pemiluakada Kota Yogyakarta tahun 2011.

b. Manfaat

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi politisi ilmu pengetahuan sosial politik, khususnya program studi Ilmu Pemerintahan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi partai politik, politisi maupun masyarakat umum sebagai sumber referensi dalam menerapkan strategi-strategi jitu dalam Pemilu.

D. Kerangka Dasar Teori

Teori merupakan titik tolak berpijak bagi langkah selanjutnya agar pembahasan tidak menentang dari topik yang akan diteliti, teori juga merupakan salah satu unsur penelitian yang penting untuk menerangkan fenomena sosial yang menjadi perhatian. Menurut Kerlinger menyatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi dan proposisi yang saling kait-mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atau fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan

diantara variable yang terkait dengan fenomena dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut⁹.

1. Partai Politik

Partai politik memiliki arti yang sangat penting dan telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik yang demokratis. Aksioma yang berlaku tidak ada sistem politik yang berjalan tanpa partai politik, kecuali sistem politik yang otoriter atau sistem kekuasaan Tradisional, dimana Raja atau penguasa dalam menjalankan kekuasaannya bergantung pada Tentara atau Polisi.¹⁰

Partai Politik sering juga disebut organisasi perjuangan, tempat seseorang atau kelompok mencari atau memperjuangkan kedudukan politik dalam Negara. Kendatipun bentuk perjuangan yang dilakukan oleh setiap Partai Politik dalam rangka menguasai politik suatu negara tidaklah harus menggunakan kekerasan ataupun kekuatan fisik tetapi yang perlu diperhatikan adalah berbagai konflik dan persaingan, baik intern partai yang senantiasa terjadi dan seakan akan sudah melembaga dalam partai politik pada umumnya.

Spirit partai dan persaingan antar partai boleh jadi sudah merupakan bagian integral didalam proses politik. Spirit dan persaingan antar partai tersebut diarahkan menuju perolehan kemenangan dalam proses Pemilihan.

⁹Zamroni. 1992. *pengantar pengembangan teori sosial*. Tiara Wacana. Yogyakarta. Hal2.

¹⁰Roy C Macridis , *pengantar sejarah, fungsi dan tipologi partai partai*, dalam Ichlasul (ed) *teori teori mutakhir partai politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988, hal 18.

Karena itu tumbuhnya spirit partai dan kelangsungan persaingan antar partai memang wajar terjadi mengingat keberhasilan dalam pilkada akan membawa partai yang bersangkutan dapat menduduki posisi pemenang. Atinya partai tersebut akan bisa berbuat banyak dalam mengendalikan dan memperjuangkan ideologi partainya , dalam kerangka tetap pada koridor memperjuangkan apa yang diamanahkan oleh masyarakat semua lapisan terutama masyarakat *grassroots*, selain itu pula dapat mempertahankan posisi elit dalam kekuasaan pemerintahan, atau lebih pada upaya untuk merealisasikan tujuan lebih lanjut , yaitu mengawasi kebijakan umum (*public policy*).

1.1. Pengertian Partai Politik

Dalam sebuah Negara Demokrasi terdapat partai politik yang lebih dari satu termasuk sebagaimana yang dialami pada saat penyelenggaraan Pemilu sebagai syarat yang paling utama, mengingat rakyat memiliki beberapa alternatif untuk memilih partai. Tanpa adanya pilihan alternatif untuk memilih maka rakyat akan sukar untuk menyalurkan aspirasi-aspirasinya. Oleh karena itu, adanya wadah penyaluran pemikiran yang berbeda beda merupakan suatu kondisi yang mau tidak mau ada. Tanpa adanya partai politik yang

lebih dari satu maka demokrasi tidak akan ditegakkan. Berikut adalah beberapa pengertian partai politik menurut beberapa pakar politik.¹¹

Menurut Carl J Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara tsabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasar penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat riil maupun materil.

Menurut RH. Soltau partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Sedangkan menurut Sigmun Neuman partai politik adalah organisasi dari aktifis aktifis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai nilai dan cita cita sama. Adapun biasanya tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dan

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal.367

dengan Konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan kebijakan mereka.¹²

1.2.Fungsi Partai Politik

Dengan mengidentifikasi suatu partai politik dalam pola partai politik, kita bisa mengetahui bagaimana partai politik dapat berjalan dengan sepenuhnya atau sebagian saja, hal ini terjadi karena memang perubahan politik di Negara kita terjadi begitu cepat sehingga manajemen perubahan berjalan lebih lambat dibanding perubahan itu sendiri. Sebagai fokus adanya perubahan itu karena adanya partisipasi politik dengan pelembagaan politik yang merupakan stabilitas dari sistem negara itu sendiri.¹³

Yang harus diperhatikan dalam menilai suatu sistem politik yaitu kandungan argumentasi yang muncul dari benak masyarakat tentang proses politik yang sedang dilaksanakan oleh partai partai politik. Dengan beragamnya persoalan riil masyarakat yang seharusnya diselesaikan agaknya telah diabaikan oleh upaya partai politik yang ada dan terlalu berlebihan dalam mengurus persoalan politik.

Dari persoalan diatas maka kita bisa mengetahui sejauh mana partai politik saat ini bisa menjalankan fungsi fungsi ideal normatifnya dengan baik. Yang seharusnya dapat diemban oleh suatu partai politik

¹²*Ibid...*Miriam Budiardjo, hal 160-161

¹³Samuel.P Huntington, *dalam partai politik dan agenda stransisi demokrasi*, hal 84.

yang berkaitan dengan fungsinya. Menurut Monte Palmor bahwa partai politik dinegara berkembang adalah menyediakan dukungan basis massa yang stabil, sarana integrasi dan mobilisasi srta memelihara kelangsungan kehidupan politik. Sementara menurut Roy C Macridis fungsi partai politiksebagai rerepresentasi melakukan artikulasi kepentingan dan ekspresi dari partai politik untuk kepentingan yang diwakilinya konvensi dan agregasi.¹⁴

Masyarakat bisa menilai bahwa ada fungsi partai politik yang sudah dapat berjalan dengan baik meskipun masih ada fungsi partai politik yang berjalan. Yang perlu diparhatiakn oleh pemerintah yaitu bagaimana menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan seimbang dalam menciptakan suatu negara secara Demokratis, sehingga fungsi fungsi tersebut harus dilihat sebagai organ yang saling berkaitan bukan untuk berebut kekuasaan.

Berikut adalah beberapa fungsi partai politik .¹⁵

a. Komunikasi Politik

Salah satu fungsi partai politik adalah menyalurkan bebrapa ide dan pendapat serta aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga ketidak jelasan ide dan pendapat tadi didalam masyarakat berkurang. Pendapat dan ide

¹⁴ *Ibid*miriam budiardjo, hal 167

¹⁵ *Ibid*...Samuel P. Hatington, hal 98

yang berbeda dimasyarakat diakomodasi oleh elit partai yang kemudian disalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan tentu saja berdasar atas kepentingan bersama. Memang pada mulanya sebelum ide dan pendapat teraplikasi kemasyarakat, elit partai terlebih dahulu merumuskan dan menetapkannya kedalam program partai untuk kemudian diteruskan ke pemerintah. Selain itu partisi politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebar luaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dengan demikian terjadi arus informasi yang *up to down* atau sebaliknya sehingga peran dari partai politik berupa penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah, dengan antara pemerintah dan warga negara. Dalam menjalankan fungsi-fungsi ini partai politik sering disebut broker atau perantara dalam suatu bursa bursa ide. Bahkan kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik adalah sebagai alat pendengar bagi perintah yang bertindak sedang warga negara sebagai pengeras suara.

b. Sosialisasi Politik

Peran lain dari partai politik adalah sarana sosialisasi politik(*instrument of political socialization*). Didalam ilmu

politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dimasyarakat dimanapun berada.

Biasanya sosialisasi ini berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai mencapai dewasa sosialisasi politik juga mencakup proses melalui arah mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi kegenerasi berikutnya.

Dalam hubungan ini, partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik dalam rangka memenangkan Pemilu kada langsung, partai harus berusaha optimal untuk memperoleh dukungan yang seluas luasnya dari masyarakat. Dan untuk mencapai tujuan ini maka partai berupaya menciptakan image yang baik dimata masyarakat bahwasanya elit-elit politik didalam partai-partai yang bersangkutan memperjuangkan kepentingan umum.

Selain berupaya menanamkan solidaritas didalam tubuh partai, partai politik juga pendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Adapun proses sosialisasi politik dapat

dilakukan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, dan penataran.

c. Rekrutmen Politik

Partai politik juga berfungsi mencari atau mengajak orang-orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian maka partai akan dapat memperluas partisipasi politik masyarakat. Caranya dapat melalui kontak pribadi dan persuasi. Juga diusahakan agar dapat merekrut kaum muda untuk dididik menjadi kader dimasa yang akan datang diharapkan dapat menggantikan posisi elit lama (*selection of leadership*)

Dengan melaksanakan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik yang bersangkutan pada dasarnya tidak perlu khawatir akan nasib masa depan kepemimpinan bangsa sebab secara tidak langsung partai-partai politik telah dapat memenuhi kebutuhannya, dengan adanya keterlibatan dari individu-individu yang berbakat dan berpotensi untuk dapat mengambil alih pucuk pimpinan lokal. Dan proses pengkaderan merupakan proses generasi dalam tubuh partai-partai politik yang bersangkutan akan dapat berjalan dengan lancar.

d. Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan sebagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

Dalam hal keputusan, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang menolong masyarakat dan juga terkadang menyulitkan masyarakat. Ini semua tidak terlepas dari artikulasi kepentingan segmen masyarakat.

e. Agregasi Kepentingan

Merupakan cara bagaimana tuntutan tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif alternatif pembuatan kebijakan publik. Indonesia adalah bangsa yang heterogen, terdapat banyak suku, ras, dan agama, sehingga perlu penjaringan aspirasi yang dapat melindungi dan menguntungkan masyarakat di semua pihak. Ketidaktahuan dalam memilih kebijakan yang tepat dapat berakibat pada ketidakpuasan kelompok masyarakat. Yang berdampak pada kepentingan politik.

f. Pengendalian Konflik

Partai politik merupakan lembaga yang mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

g. Kontrol Politik

Merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk meluruskan kebijakan atau pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut.

Fungsi lain dari partai politik adalah dalam upaya agar dapat menguasai negara adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Mengadakan pendidikan politik yang terarah kepada sasarnya. Tanpa pendidikan politik yang efektif maka partai politik itu tidak akan mempunyai kader.

¹⁶Erman Hermawan, *politik membela yang benar*, Yayasan pengkajian dan layanan informasi untuk kedaulatan rakyat, Yogyakarta, 2001, hal 71-72.

2. Memasyarakatkan ajaran ajaran politik secara efektif sehingga rakyat merasakan kegunaannya.
3. Memilih pemimpin pemimpin politik secara demokratis, sehingga pemimpin yang dipilih betul-betul tangguh dan bertanggung jawab atas kehidupan partai politik yang diharapkan.
4. Memadukan pikiran pikiran politik yang berbeda, baik antara pemimpin dengan pemimpin maupun antar pemimpin dengan bawahanya. Pemikiran pemimpin politik yang berbeda bahkan bertentangan satu dengan yang lain akan menimbulkan terjadinya perpisahan, akibatnya partai politik itu sendiri yang pada akhirnya akan pecah.
5. Memperjuangkan kepentingan rakyat baik kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Partai politik yang tidak dapat menjalankan fungsinya ini akan dengan sendirinya ditinggalkan oleh pengikutnya sehingga semakin lama gerak partai akan semakin kecil. Akhirnya enggan untuk tetap hidup ataupun mati, mengingat bahwa kepentingan kepentingan politik, sosial, ekonomi dan budaya sebenarnya merupakan hak-hak asasi manusia.
6. Mengkritik atau mengawasi rezim yang memerintah. Partai yang tidak berani mengkritik jalannya pemerintahan

diindikasikan ada dua kemungkinan yaitu partai yang mendapat subsidi dari pemerintah atau pemimpin partainya yang tidak mempunyai program, sehingga selalu ikut program partai partai atau golongan yang sedang memerintah agar partai politik dapat melakukan pengawasan atau kritik yang efektif maka diperlukan beberapa syarat:¹⁷

- a. Pemimpin partainya tidak dipilih oleh pemerintah
- b. Pemimpin partai tidak ikut duduk dalam pemerintahan (badan eksekutif) jika kalah dalam pemilu.
- c. Partai politik bukan hanya merupakan partai masa akan tetapi juga partai kader.
- d. Partai politik harus mempunyai disiplin yang kuat baik disiplin terhadap prinsip maupun terhadap program.
- e. Partai politik mempunyai program dan ideologi yang jelas
- f. Partai politik mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan rakyat, kepribadian bangsa, dan tujuan negara, bukan terhadap kepentingan program atau kelompok kecil yang mengelilingi pemimpin politik.

¹⁷*Ibid*...Erman Hermawan. hal 125.

1.3. Sistem Kepartain

Dalam suatu negara terdapat beberapa sistem kapartaian yang diatur dalam undang undang, beberapa dari sistem kepartaian dapat dilihat dibawah ini:¹⁸

1. Sistem Satu Partai

Sistem satu partai menunjukkan kepada kita bahwa disuatu negara hanya terdapat satu partai politik yang dominan dalam arti partai politik tersebut memainkan peran yang dominan dalam kehidupan politik dinegara dimana dia berada. Partai politik yang ada di negara yang menganut sistem satu partai atau partai tunggal mungkin memang benar benar merupakan satu satunya partai politik yang ada dinegara tersebut tetapi mungkin pula disamping partai politik tersebut di negar itu masi terdapat beberapa partai partai politik yang tidak mempunyai peranan penting dalam kehidupan politik. Pada umumnya negara-negara yang menganut sistem ini adalah negara-negara yang baru merdeka.

2. Sistem Dua Partai

Sistem dua partai menunjukkan pada kita bahwa disuatu negara hanya terdapat dua partai politik yang dominan. Dan

¹⁸ Pamungkas sigit, 2011, Partai Politik teori dan praktik di indonesia, Institute for democracy and welfarism, yogyakarta.

hanya dua partai politik itu saja yang memainkan peran yang dominan dalam kehidupan politik dalam suatu negara yang menerapkannya. Akan tetapi disamping kedua partai politik yang berperan dominan tersebut banyak terdapat partai partai kecil yang kurang berperan atau bahkan tidak berperan sama sekali, yang bila ditiadakan maka tidak berpengaruh terhadap kehidupan politik dinegara tersebut. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat. Partai yang paling dominan adalah Partai Republik dan Demokrat, sedang partai kecilnya adalah Partai Buruh dan Partai Petani Sosialis.

3. Sistem Banyak Partai

Sistem banyak partai menunjukkan bahwa disuatu negara terdapat banyak partai yang jumlahnya lebih dari dua partai. Partai partai politik tersebut memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik dinegara yang menerapkannya. Pada umumnya negara yang menganut sistem banyak partai adalah negara yang masyarakatnya majemuk. Kemajemukan masyarakat dapat ditunjukkan dengan terdapatnya bermacam macam perbedaan sosial. Contoh negara yang menerapkan sistem banyak partai seperti Indonesia, Nederland, Kanada, Skandinavia.

2. Pemilu

2.1 Pengertian Pemilu

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa pemilu adalah merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan.¹⁹ Pemilihan pada hakikatnya adalah suatu kenyataan yang dilakukan oleh rakyat pemilih untuk memilih wakil-wakilnya, atau pun pejabat-pejabatnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat yang selanjutnya yang disebut DPR

Pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berdaulat rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilu merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat.²⁰ Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting, ia merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.²¹ Hal tersebut disebabkan oleh karena rakyat atau warga negara mempunyai hak untuk memilih dengan bebas. Maka berarti rakyat sudah ikut terlibat dalam kehidupan kenegaraan walaupun secara tidak langsung.

Pemilu merupakan salah satu ciri yang melekat pada negara yang menganut paham demokrasi. Dengan demikian berarti pula bahwa pemilu merupakan sarana yang penting untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan

¹⁹Haryanto, *partai politik suatu tunjauan umum*, Liberty, Yogyakarta 1984, hal. 81

²⁰Ibid, hal. 61.

²¹A. Suduharto Djiwandono dalam haryanto, *partai politik suatu injaunan umum*, Liberty, Yogyakarta, 198, hal, 11.

kenegaraan yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan.²² Oleh karena itu muncul suatu anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang terlibat dalam pemilu dan semakin tinggi tingkat kebebasan dari pengaruh maupun tekanan atau paksaan dari pihak-pihak tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemilu, maka dapat dinyatakan menjadi semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat di negara yang menyelenggarakan pemilu itu.

Pemilihan umum menurut Harris G Warren dan kawan-kawan adalah merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu para warga menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki.²³

Pemilu tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi pemilu itu harus dilaksanakan dalam waktu tertentu. Pemilihan umum merupakan pranata terpenting dalam setiap negara demokrasi. Pranata ini berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintah secara teratur.

²²Opcit. Hariyanto, hal, 84.

²³*Ibit* ...hal 56.

Dalam fenomena Pemilu, ketentuan pemilu yang sesuai dengan amandemen UUD 1954 yaitu terdapat pada UUD 1954 didalam Bab VII B yang mengatur tentang pemilihan umum. Ini merupakan perubahan ketiga dari konstitusi tahun 2001. Dalam pasal 22 E ayat (1) dinyatakan

“ pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali”.

Kemudian pada ayat (2) menyatakan

“ pemilihan diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, serta dewan perwakilan rakyat daerah”.

Sementara itu sebagai pelaksana disebutkan dalam ayat (5) yaitu

“pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Selain dalam menilai kepribadian kandidat saat pemilihan umum, perilaku pemilih dipengaruhi jaringan sosial, seperti ikatan primordial dan keagamaan. Clifford Geertz melakukan penelitian tentang perilaku pemilih di Indonesia pada pemilu tahun 1955. Penelitian itu menyimpulkan bahwa perilaku pemilih dilatar belakangi oleh ikatan-ikatan primordial. Rakyat memilih partai politik tidak berdasarkan persetujuan mereka terhadap program partai secara rasional, tetapi berdasarkan pada loyalitas dan identitas agama, daerah, dan suku. Kemudian penelitian yang sama dilakukan oleh R. William Riddle, untuk pemilu 1999. Ternyata perilaku

pemilih pada pemilu 1999 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dibanding tahun 1955. Aspek kesukuan dan kedaerahan memang berkurang, tetapi aspek loyalitas dan identitas agama masih berperan.²⁴ dengan demikian penemuan Clifford Geertz masih relevan untuk pemilihan umum hingga saat ini.

Berdasarkan pendapat diatas maka apabila difahami lebih jauh pada hakekatnya pemilihan umum adalah suatu sarana untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam jabatan pemerintah. Seperti kita ketahui selama ini selama ini hanya merupakan sarana untuk legitimasi kekuasaan. Padahal lebih dari itu pemilu adalah untuk memilih wakil wakil yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Pemilu juga merupakan pilar bagi suatu negara yang mengaku dirinya sebagai suatu negara yang demokrasi sebab tidak ada demokrasi tanpa ada pemilihan umum.

2.2 Sistem Pemilu

Dalam ilmu politik dikenal bermacam macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu:

²⁴Siti Fatimah, 2004, *persepsi dan perilaku pemilihan di kota bandung menjelang pemilu 2004. Dalam sminar internasional ke 5 dinamika politik lokal di Indonesia demokrasi dan potert pemilu ditingkat lokal*, tanggal 14-17 juli di Kampung Percik Salatiga , hal 1. (dalam artikel)

- a. *Singel member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, yang biasanya disebut dengan distrik)
- b. *Multi member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem proporsional)²⁵

Dari dua sistem pemilu diatas masih ada beberapa varian sistem pemilu, seperti *block vote* (BV), *alternative vote* (AV), *two round sistem* (TRS), sistem *paralel limited vote* (LV), *singel non transferable vote* (SNTV), *mixed member proportional* (MMP), *singel transferable vote* (STV), tiga yang pertama lebih dekat dengan sistem distrik, sedangkan yang lain lebihdekat pada sistem proporsional atau semi proporsional.

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas atau (suara terbanyak). Sedangkan dalam sistem proporsional satu wilayah besar memilih beberapa wakil. Perbedaan pokok dalam dua sistem ini adalah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi asing masing partai politik.

Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dalam satu wilayah, satu distrik hanya berhak satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini yang dinamakan dengan *the first past the post* (FPTP). Pemenang memperoleh

²⁵Jean Blondel, *electoral system and the influence of electoral system on party system, dalam an introduction to comparative goverment* (London : Menthuen and Coltd, 1054), hal 45-59, dan Mariam Budiardjo *demokrasi di Indonesia*, hal. 246.

satu kursi , hal ini terjadi sekalipun selisih suara dengan partai lain hanya kecil saja. Suara yang tadinya mendukung kontestan lain dianggap hilang (*wasted*) dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partainya didistrik lain.

Sedangkan dalam sistem proporsional satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara rasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Dalam sistem proporsional representatif tidak ada suara yang hilang, semuanya habis dibagi oleh jumlah kursi yang tersedia. Sistem distrik sering digunakan oleh negara negara yang mempunyai sistem dwi partai seperti inggris, malaysia, dan amerika. Sistem proporsional sering digunakan oleh negara negara dengan banyak partai seperti belgia, swedia, italia, belanda, dan Indonesia.

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kemenangan Pemilu

Dalam kemenangan pemilu tim sukses mempunyai peran yang sangat penting. Tim sukses dibentuk dengan tujuan untuk memenangkan kontestan yang didukungnya. Secara kognitif anggota tim sukses menyadari kekurangan partai dan kandidat bakal calon baik dalam bentuk ril ataupun materil.

Secara regulatif normatif berangkat dari kesadaran kognitif mereka menyatukan dukungan dan membuat aturan dalam bentuk manajemen kampanye. Tugas dari timsukses adalah untuk menyampaikan pesan politik

dari partai politik dan kandidat. Penyampaian pesan inilah yang kemudian didesain semenarik mungkin, kreatif, menyentuh sehingga mampu menarik simpati masyarakat.

Oleh karena itu tim sukses selaku perancang pesan harus memiliki kepekaan dalam mengidentifikasi karakteristik khalayaknya dan memiliki kreatifitas dalam mendesain pesan sehingga pesan yang disampaikan tepat sasaran. Akan tetapi supaya tepat sasaran, sebelumnya tim sukses harus melakukan segmentasi pasar terlebih dahulu. Karena dengan segmentasi pasar maka kita dapat memetakan karakteristik pemilih yang akan kita jadikan obyek.

Sehingga tim sukses mudah untuk mentransfer pesan politik yang akan disampainya. Transfer pesan menurut Pipa Norris dapat disalurkan dengan tiga metode yaitu *people intensive campaigns*, *broedcasting campaigns*, dan *internet campaigns*.

Menurut Norris, untuk pemilihan umum ditingkat lokal, dimana sasaran kampanye tidak terlalu luas, *people intensive campaigns* merupakan saluran yang paling efektif. Karena metode ini mendasarkan pada komunikasi antar personal antara kandidat dengan pemilih sehingga kedekatan interpersonal diperoleh. Selanjutnya dalam pemberitaan media masa metode ini akan menimbulkan simpati dan akhirnya kampanye

dengan model ini memiliki kekuatan dalam membangun kedekatan sosial dan loyalitas diantara pemilih.²⁶

Kemudian melalui *intermediary actors* tim sukses menyampaikan makna politis agar sampai kebenak pemilih sesuai karakter golongan pemilih. Dengan melakukan *intermediary actors* dari berbagai golongan masyarakat, tim sukses dapat memperoleh berbagai isu yang berkembang diberbagaai kalangan. Selanjutnya dengan informasi ini tim sukses dapat menentukan metode membangun citra kontestan.

Dari penjabaran diatas maka dapat diambil kesimpulan baha peran tim sukses dalam kampanye adalah sebagai berikut :

1. Memetakan karakteristik pemilih yang merupakan alngkah awal untuk mengetahui siapa calon pemilih dan apa yang diinginkan pemilih.
2. Memetakan isu isu krusial dalam PemiluKada yang kemudian untuk mempermudah dalam
3. Membangun citra politik pasangan kandidat dari partai.

²⁶Pipa Norris,2005, *political parties and demokrasi in theoritical and practical perpectives, developments in party communication, National democratic institute for international affairs, (NDI) (USA)*, dalam www.ndi.org, hal 4.

2.4. Pilkada

Sebagai proses dari transformasi politik, maka pilkada selain dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme checks and balances diantara lembaga lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar Pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang lebih akuntabel, berkualitas, legitimasi, aspiratif, dan peka terhadap kepentingan masyarakat.

Ciri lain dari Pilkada yang sekaligus merupakan keunggulan dari semua sistem pilkada yang pernah dilaksanakan adalah terletak pada pola pergeseran pemilihan. Dari model elit vote, ke model popular vote, inilah suatu model yang pemilihan yang memasuki era liberalisasi politik, karena dalam sistem pemilihan itu memungkinkan hadirnya jumlah kontestan yang banyak dalam ruang pasar pilih yang sangat banyak pula.

Jika menyimak UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang didalamnya mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Sistem Pilkada yang kita anut menggunakan sistem pemilihan dua putaran. Artinya jika pasangan calon tidak berhasil mengumpulkan 50 %+1 suara atau lebih dari 25 % suara, maka diadakan pilkada putaran kedua. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 107 ayat (1)

“pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih “ dan pasal 107 ayat (2)

“ apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25 % dari jumlah suara sah pasangan calon yang memperoleh suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih ”.

3. Pemasaran Politik

Marketing politik pelan tapi pasti telah mulai masuk keranah kehidupan politik di Indonesia. Kemampuan berfikir manusia telah mengubah struktur dan pola interaksi sosial kemasyarakatan, hingga menimbulkan hubungan antara antara manusia satu dengan lainnya saling ketergantungan.

Strategi strategi dalam marketing politik darimasa-kemasa mengalami perkembangan. Dalam kehidupan berpolitik memang sangat diperlukan strategi-strategi yang jitu untuk mengalahkan lawan politik. Para politikus banyak menggunakan cara baru bahkan tak segan mereka menggunakan cara curang untuk mengalahkan lawan mainnya. Dengan marketing politik yang benar maka seharusnya kecurangan-kecurangan itu dapat dihindari.

Bagozzi melihat bahwa marketing politik adalah proses yang memungkinkan adanya pertukaran (*exchange*) antara dua pihak atau lebih. Artinya aktifitas marketing akan selalu ditemui dalam proses pertukaran. Dalam pertukaran terdapat proses hubungan (*relation*) yang memungkinkan interaksi, dimana dalam proses masing-masing pihak ingin memaksimalkan dan menjamin bahwa kepentingan sendiri terpenuhi. Dalam proses interaksi juga terjadi proses tukar menukar. Dalam proses ini satu pihak bersedia

memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Proses tukar-menukar ini membutuhkan negosiasi dan tawar-menawar yang merupakan mekanisme untuk mengushakan maksimalisasi kepentingan masing masing pihak. Itulah marketing merupakan hubungan dan pertukaran.²⁷

Firmansya mengatakan bahwa hal penting yang ingin disampaikan dalam konsep pemasaran politik adalah:

3. Pemasaran politik menempatkan pemilih sebagai subyek, bukan obyek dari partai politik atau kandidat.
4. Pemasaran politik menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih sebagai langkah awal dalam menyusun program kerja yang ditawarkan dengan bingkai ideologi masing masing partai atau kandidat.
5. Pemasaran politik tidak menjamin sebuah kemenangan, tetapi menyediakan tools untuk menjaga hubungan dengan pemilih, sehingga dari sini akan terbangun kepercayaan untuk selanjutnya memperoleh dukungan suara.

Dalam dunia marketing terdapat pengelompokan yang biasa disebut segmentasi, yaitu memilah-milah pasar dengan kesamaan-kesamaan tertentu. Segmentasi pasar dapat ditinjau berdasarkan kultur dan subkultur besar, selain itu pasar juga dapat ditinjau secara demografis, gaya hidup, cohort, dan kepentingan tertentu. Intinya setiap kelompok cenderung memiliki rujukan

²⁷Op.Cit, Firmansyah hal, 137.

kognitif atau aspirasi dan perilaku politik yang sama. Maka dari itu kita perlu menggaris bawahi beberapa hal sebagai berikut:²⁸

- Political marketing bertitik tolak dari konsep meaning, yakni *political marketing* yang dihasilkan oleh stimulus politik. Beberapa komunikasi politik, baik lisan maupun non lisan, baik langsung maupun tidak langsung.
- Makna yang muncul dari stimulus tersebut berupa persepsi yang tidak selalu mencerminkan makna yang sebenarnya.
- Persepsi terbentuk dari hasil interaksi antara stimulus politik dengan kesadaran kognitif atau alam pikiran seseorang.
- Makna akibat adanya stimulus politik pada gilirannya akan mempengaruhi sikap, aspirasi dan perilaku politik, termasuk pilihan politik.
- Sekelompok orang dengan latar belakang tertentu yang sama, memiliki sejumlah kesamaan rujukan kognitif sehingga cenderung memberi makna yang sama terhadap stimulus tertentu.

Menurut Nursal ada beberapa kategori segmentasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi kelompok pemilih, antara lain.²⁹

²⁸Adman Nursal, *political marketing, strategi memenangkan pemilu, sebuah pendekatan baru kampanye pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2004, hal 27-28.

²⁹Ibit, hal, 114-126.

a. Segmentasi Demografis

Segmentasi demografis ialah pemilihan pada pemilih berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, gender, agama, pendidikan, pekerjaan, kelas sosial ekonomi, dan sebagainya. Dalam pemasaran produk komersial, segmentasi demografis dianggap sebagai segmentasi yang tradisional dan sering kali kurang memadai untuk memahami karakter konsumen dalam arena persaingan ketat. Tetapi untuk pemasaran partai politik pemahaman mendalam tentang segmentasi demografis dapat memberi kontribusi berharga untuk kesuksesan pemasaran, walaupun tetap dianjurkan untuk menggunakan pendekatan lainnya.

b. Segmentasi Agama

Segmentasi berdasarkan agama merupakan salah satu pendekatan segmentasi yang penting untuk memahami karakter pemilih di Indonesia. Beberapa studi menunjukkan umumnya para pemilih non islam tidak memilih partai islam. Dengan demikian segmen pemilih yang tidak beragama islam akan melirik partai yang memiliki landasan inklusif dan pluralis atau partai eksklusif sesuai dengan agama masing-masing segmen.

c. Segmentasi Gender

Segmentasi berdasarkan gender tentu saja menghasilkan dua segmen: kaum laki-laki dan kaum perempuan. Segmen pemilih perempuan memiliki makna strategis karena menghadapi masalah khas yang dapat diolah menjadi isu politik. Jumlahnya pun lebih 50 persen dari total populasi pemilih.

d. Segmentasi Usia

Rhenal Kasali, membagi manusia dewasa menjadi lima segmen: masa transisi, masa pembentukan keluarga, masa peningkatan karir dan pekerjaan, masa keamanan, dan masa persiapan pensiun, setiap segmen memiliki karakter khas yang perlu untuk dicermati.

e. Segmentasi Kelas Sosial

Pada pemasaran produk komersial, para pemasar sering melakukan segmentasi berdasarkan tingkat pendapatan. Dalam pemasaran politik, segmentasi berdasarkan pendapatan ini juga dibutuhkan tetapi perlu dilengkapi dengan faktor-faktor lainnya. Selain ukuran kekayaan dan kebendaan, lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat juga ditentukan oleh ukuran kekuasaan, kehormatan dan penguasaan ilmu pengetahuan.

Kelas sosial menurut Sorjono Soekanto, memberi kesempatan atau fasilitas tertentu kepada warganya. Suatu kelas misalnya,

memiliki harta benda, kebebasan dan standar hidup yang berbeda dengan kelas lainnya. Demikian pula gaya hidup dan permasalahan yang dihadapi setiap kelas.

f. Segmentasi Geografis

Segmentasi geografis membagi-bagi para pemilih berdasarkan wilayah tempat tinggal. Salah satu contoh segmentasi geografis ini adalah dengan membagi Indonesia menjadi tiga wilayah, pertama segmen Pulau Jawa, kedua Kawasan Timur Indonesia, ketiga segmen Luar Pulau Jawa. Tiga segmen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Segmentasi geografis dapat juga dikembangkan berdasarkan Pulau, Provinsi, Kota, Desa, dan sebagainya.

g. Segmentasi Psikografis

Segmentasi psikografis adalah segmentasi berdasarkan gaya hidup, yakni bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Gaya hidup menurut Angel, mencerminkan aktifitas, ketertarikan dan opini seseorang. Para pemilih menggunakan konstruk-konstruk tersebut untuk menafsirkan apa yang terjadi disekitar mereka. Konstruk-konstruk tersebut juga untuk menginterpretasikan, konseptualisasi, dan menduga kejadian kejadian dan merujuk nilai-nilai yang mereka yakini dengan kejadian tersebut.

Dalam pemasaran politik segmentasi psikografis berguna untuk mensosialisasikan atau mengkomunikasikan tawaran partai kepada khalayak pemilih. Diluar negeri metode ini pernah digunakan di Kanada pada pemilu tingkat Provinsi studi yang dilakukan ditahu 1979 itu menghasilkan beberapa segmen pemilih berdasarkan perbedaan sikap terhadap masalah kesejahteraan.

h. Segmentasi Kohor

Sebuah kohor adalah kelompok individu dengan perilaku dan sikap tertentu dan diasosiasikan dengan peristiwa yang terjadi dalam periode tertentu. Jadi sebuah kohor disebut juga suatu generasi. Analisis kohor menurut Engel merupakan sebuah metode untuk meneliti pola perubahan sikap suatu kohor.

Di Indonesia segmentasi kohor diperkenalkan Rhenald Kasali, ia membagi pasar Indonesia menjadi enam kohor. Segmentasi kohor ini sangat berguna untuk menganalisis perbedaan sikap dan perilaku pemilih untuk generasi yang berbeda. Analisis kohor juga bermanfaat untuk menganalisis kebangkitan kembali partai yang pernah eksis pada masa silam.

i. Segmentasi Perilaku

Secara umum berbagai tipe perilaku pemilih telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Tipe-tipe perilaku tersebut pada dasarnya bis

diolah menjadi landasan untuk melakukan segmentasi. Selain mengolah tipe tipe tersebut, para pemilih juga dikelompokkan menjadi empat segmen berdasarkan perilaku. Keempat segmen ini dikembangkan oleh Newman sebagai bagian dari *political marketing* yang bertujuan memenangkan Bill Clinton menjadi presiden Amerika Serikat untuk yang kedua kalinya. Segmentasi berdasarkan perilaku pemilih dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:

- Segmen pemilih rasional: kelompok pemilih yang memfokuskan perhatiannya pada isu dan kebijakan kontestan pemilu dalam menentukan pilihan politiknya.
- Segmen pemilih emosional: kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu terhadap kandidat dalam menentukan pilihan politiknya.
- Segmen pemilih sosial: kelompok pemilih yang mengasosiasikan kontestan pemilu dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam menentukan pilihan politiknya.
- Segmen pemilih situasional: kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya situasional menjelang pemilu dalam menentukan pilihan politiknya.³⁰

³⁰ Ibiat ...Adnan Nursal, hal, 87-88

4. Strategi Kampanye

4.1 Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* (*stratus*: militer dan *ag* pemimpin) yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal atau dalam perang, dalam hal membuat rencana untuk memenangkan perang , jadi istilah strategi pada awalnya muncul dalam dunia militer.³¹ Definisi strategi menurut Christence : pola pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dirumuskan demikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh organisasi. Demikian juga sifat organisasi baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Menurut Glaeck strategi adalah suatu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi organisasi dengan lingkungan yang dihadapinya, kesemuanya menjamin agar tujuan organisasi tercapai³².

4.2 Strategi Pemenangan

Strategi pemenangan merupakan upaya upaya dan aksi aksi nyata yang dilakukan oleh partai politik untuk memenangkan pemilu. Guna mencapai tujuan jangka panjang dan antara partai politik membutuhkan strategi jangka

³¹Bryson J.M., perencanaan strategis bagi organisasi sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999 hal 16

³²Opcit....hal 33

panjang strategi partai dapat dibedakan dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut:³³

- Strategi yang terkait dengan penggalangan dana dan mobilisasi massa dalam pembentukan opini publik selama periode pemilihan umum. Strategi ini penting dilakukan untuk memenangkan perolehan suara yang mendukung kemenangan suatu partai politik ataupun kandidat yang diusung.
- Strategi partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain. Cara ini dimungkinkan sejauh partai yang akan diajak berkoalisi itu konsisten dengan ideologi partai politik yang mengajak berkoalisi dan tidak hanya mengejar tujuan praktis yaitu memenangkan pemilu. Pemilihan partai yang diajak berkoalisi perlu mempertimbangkan image yang akan ditangkap oleh masyarakat luas.
- Strategi partai politik dalam mengembangkan dan membudayakan organisasi partai politik secara keseluruhan, mulai dari strategi, penggalangan dana, pemberdayaan anggota dan kaderisasi, penyempurnaan mekanisme pemilihan anggota serta pemimpin partai, dan sebagainya.
- Partai politik membutuhkan strategi umum untuk bisa terus menerus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, seperti peraturan

³³Firmansyah, 2008, mengelola partai politik: komunikasi dan positioning ideology politik di era reformasi , Yayasan Obor, Jakarta, hal: 109-110

pemerintah, LSM, Pers, Media serta kecendrungan-kecendrungan dilevel global.

Strategi diatas merupakan strategi mencapai sebuah tujuan partai politik yang telah ditetapkan, ideologi adalah sebagai arah penjabaran gerak organisasi termasuk strategi.

4.3 Kampanye

Menurut Pfau dan Parrot kampanye merupakan suatu proses yang dirancang secara sadar, terhadap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang ditentukan. Leslie B Snyder mendefinisikan kampanye komunikasi sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu. Definisi lain yang populer adalah yang disampaikan oleh Roger dan Storey, mereka mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.³⁴

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka aktifitas kampanye bisa didefinisikan dalam empat unsur yaitu :

- Tindakan kampanye ditunjukkan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu

³⁴ Op.cit...juliansyah. hal. 62

- Jumlah sasaran yang besar
- Dipusatkan dalam kurun waktu tertentu
- Elalu serangkain tindakan komunikasi yang teerorganisir.

Kampanye secara umum dapat dibedakan dalam kategori berdasarkan motifasi kampanye, seperti diungkapkan oleh Charles U. Larson sebagai berikut :³⁵

1. *Product oriented campaign* atau kampanye yang berorientasi produk, pada umumnya terkait dengan bisnis. Dalam istilah yang lain kampanye ini juga disebut sebagai *commercial campaigns*. Motifasi yang mendasarinya adalah untuk memperoleh keuntungn financial.
2. *Candidatts oriented campaigns* atau kampanye yang berorientasi pada kandidat dan umumnya dimotifasi untuk mendapatkan kekuasaan politik. Oleh karena itu kampanye jenis ini juga sering disebut juga dengan *political campaigns* atau kampanye politik. Tujuanya antara lain untuk memenangkan pemilu atau menduduki jabatan publik.
3. *Ideologically or cuse oriented campaigns*, yaitu jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan tujuan yang bersifat khusus atau sering kali berdimensi perubahan sosial. Oleh karena itu kampanye jenis ini sering juga disebut *social change campaigns* yang bertujuan untuk menangani

³⁵ Op.cit...miriam budiardjo. Hal 168

masalah masalah sosial melauai perubahan sikap dan prilaku publik yag terkait.

E. Defenisi Konsepsional

Konsep ini digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep ini juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau indifidu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.³⁶ Adapun yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

1. Partai Politik

Partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki cita cita dan tujuan yang sama, dan berusaha untuk merebut kekuasaan. Partai politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partai politik yang turut mendukung kandidat dalam Pemilukada kota Yogyakarta. Diantaranya adalah partai PDI-P, Golkar, PAN, PKS, Demokrat, PPP, Gerindra dan Hanura.

³⁶Masri singarimbun, metode penelitian survey, LP3S, jakarta, 1992, hal 34.

2. Pemilukada

Pemilukada adalah sebuah proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara terbuka, jujur dan adil, sesuai dengan UU NO 32 TAHUN 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang dimaksud dalam Pemilukada diatas adalah Pemilukada pemilihan walikota dan wakil walikota Ygyakarta tahun 2011.

3. Pemasaran Politik

Pemasaran politik adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik atau kandidat untuk menyampaikan pesan politik, berupa kebijakan, program, visi misi, dalam sebuah pemilu atau pemilukada. Pemasaran politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemasaran politik partai PDI-Perjuang dan kandidat yang diusungnya dalam pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2011.

4. Strategi

Strategi adalah sebuah metode atau trik untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Strategi dalam penelitian ini adalah strategi PDI-Perjuangan dalam memenangkan pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2011.

F. Definisi Operasionl

Defenisi operasional adalah bagaimana cara mengukur dan melihat suatu variabel. Sehingga penelitian ini akan benar benar terarah dengan

baik dan jelas. Agar suatu penelitian dapat diukur variabelnya maka perlu dioperasionalkan dalam penelitian. Dengan kata lain variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang sudah dicermati.

Untuk memudahkan penulis dalam mengukur variabelnya, maka dari itu penulis menggunakan definisi operasional sebagai berikut :³⁷

1. Strategi Internal

Strategi pemberdayaan dalam struktur, interaksi dan budaya organisasi dan optimalisasi sumberdaya partai meliputi.

a. Mesin Partai

- Konsolidasi internal: memainkan fungsi struktur melalui pembagian tugas yang jelas untuk memudahkan koordinasi.
- Mempersiapkan kader
- Penggalangan dana
- Sistem rekrutmen kandidat
- Memperkuat informasi dan komunikasi

b. Kandidat atau Anggota

³⁷*Opcit...*Firmanyah, hal 109-110

Kemampuan memaksimalkan sumberdaya politik dalam mendukung strategi kampanye untuk memperoleh dukungan sebanyak banyaknya.

2. Strategi Eksternal

Strategi yang ditunjukkan oleh partai atau kandidat kepada pihak pihak yang berada diluar lingkungan Partai atau Kandidat. Strategi ini berupa:

- Koalisi dengn partai lain

Merupakan bentuk kerja sama antar partai politik dalam pemilu atau Pemilukada dengan tujuan untuk memperbesar perolehan suara.

- *Policy*

Dalam bentuk tawaran program kerja jika terpilih kelak dan solusi yang ditawarkan partai atau kontestan untuk memecahkan masalah masyarakat berdasarkan isu isu yang dianggap penting oleh para pemilih. Yang meliputi citra dan popularitas kandidat dimata pemilih, performace, kopetensi, pesona fisik maupun aura yang dipancarkan oleh kandidat yang mempengaruhi pasar politik yang terdiri atas tiga bagian yaitu : pemilih, kelompok berpengaruh, dan media massa.

- Kampanye politik meliputi : bentuk bentuk kampanye, metode kampanye, dan instrumen kampanye yang digunakan.
- Perbaikan citra politik melalui media masa dan secara langsung.
- Melakukan pendekatan dengan ormas ormas yang berbasis agama, karena masyarakat Kota Yogyakarta masih memiliki loyalitas yang tinggi terhadap tokoh agama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, menurut Creswell Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.³⁸ Menurut Bogdan dan Taylor di dalam bukunya Moleong, mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

²⁵Creswell 1998:15, dalam <http://www.penalarnan-unm.org/artikel-nalar/penelitian/metode-penelitian-kualitatif/9-7-2011/11:13/html>.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁹

Penelitian kualitatif dapat dikonstruksi sebagai satu strategi penelitian yang biasanya menekankan kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data, menekankan pendekatan induktif untuk hubungan antara teori dan penelitian, yang tekanannya pada penempatan penciptaan teori (*generation of theory*). Oleh karena itu, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik \lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.⁴⁰

Selanjutnya, dipilihnya jenis penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti dalam penggunaan pendekatan ini. Dengan penelitian ini peneliti mampu mendapatkan semua informasi data terkait dengan persiapan atau strategi partai PDI-P dalam menghadapi Pemilu kota Yogyakarta. Dan peneliti berharap dengan penelitian kualitatif ini dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang

³⁹Moleong 2007:3, dalam <http://www.penalarn-unm.org/penelitian/metode-penelitian-kualitatif/9-7-2011/11:13/html>.

⁴⁰Silalahi, Ulber dalam bukunya Creswell, John.1994.*Research Design: Qualitative and Qualitative Approach*. Oslo: sage publications.p. 1-2

fenomena pelaksanaan Pemilu pada tahun 2011 secara objektif dari narasumber yang peneliti dapatkan.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer (*primary data*) adalah suatu objek atau dokumen original material menatah dari pelaku yang disebut "*first-hand information*". Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer.⁴¹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada sumber sumber yang telah ditetapkan seperti ketua dan pengurus DPD PDI-P kota Yogyakarta, beberapa timsukses yang dipilih secara acak, tokoh masyarakat dan Bapilu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua (*second-hand information*) atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia disebut

⁴¹ Uma Sekaran, 1992. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 2ded. New York: John Wiley & Sons, Inc, p. 33.

data sekunder⁴². Sumber data sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang diperoleh dari KPUD Kota Yogyakarta yang didapat oleh peneliti melalui internet maupun didapat secara langsung, buku-buku, makalah, jurnal, dan arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi. Karena itu, wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interview*) dengan sejumlah orang sebagai

⁴²*Ibid*, hal. 33.

responden atau yang diwawancara (*interview*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴³

Peneliti melakukan wawancara dengan ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Yogyakarta dengan menggunakan tipe wawancara terstruktur dimana pewawancara memiliki sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan mengadakan wawancara atas dasar atau panduan pertanyaan tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa tim sukses dari partai PDI-Perjuangan kota Yogyakarta yang dipilih secara acak, dan wawancara dengan menggunakan tipe wawancara tak terstruktur dimana pewawancara tidak memiliki daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, pewawancara hanya mempunyai daftar topik tentang hal yang akan ditanyakan kepada sumber. Selain metode wawancara peneliti juga menggunakan metode lain seperti dibawah ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Paul Otlet adalah kegiatan khusus berupa pengumpulan penyimpanan penemuan kembali dan penyebaran dokumen. Sedangkan dalam kamus besar

⁴³*Ibid*, hal. 312.

bahasa Indonesia dokumentasi merupakan sesuatu yang tertulis tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.⁴⁴ Data-data tertulis dari KPUD Kota Yogyakarta yang didapat melalui internet maupun didapat secara langsung, data dari surat kabar, makalah, arsip yang berkaitan dengan penelitian ini merupakan dokumentasi yang dibutuhkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini.

4. Unit Analisa Data

Untuk mendapatkan infoemasi tentang strategi partai PDIP dalam Pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2011, sebagai pelengkap dalam penyusunan skripsi maka peneliti memfokuskan unit analisisnya pada:

- Ketua dan pengurus DPC PDI-Perjuangan Kota Yogyakarta
- DPC Partai Golkar Kota Yogyakarta
- Tim sukses pasangan Haryadi Suyuti- Imam Priyono
- Tim sukses Hanafi Rais- Tri Harjun
- Tim sukses Zuhrif-Aulia
- Tokoh masyarakat
- Ormas GERAM (Gerakan Rakyat Mataram)
- KPUD Kota Yogyakarta (bersifat data dokumentasi)

⁴⁴*Ibid*, hal. 299.

5. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam menganalisis data ini adalah :

- a. *Editing*, yaitu membuang data-data yang tidak perlu dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga mendapatkan data yang akurat.
- b. *Coding*, yaitu mengklasifikasikan data dan mendistribusikan data ke dalam kelompok-kelompok masalah yang diteliti.
- c. *Interpretasi*, yaitu memberikan uraian rinci baik secara kualitatif maupun kuantitatif (*numerik*).